

LAPORAN TRIWULAN I TAHUN 2025

1. Perkembangan Inflasi Daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko kedepan

Perkembangan inflasi Kabupaten Lima Puluh Kota mengacu pada indeks inflasi Kota Bukittinggi atau Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan inflasi Sumatera Barat sepanjang 2025 adalah sebagai berikut :

Januari	Februari	Maret
0,03%	0.16%	1.03%

Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Sumatera Barat sebesar 1,24 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,93. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 2,38 persen dengan IHK sebesar 108,40 dan terendah terjadi di Kota Padang sebesar 0,81 persen dengan IHK sebesar 106,39.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,60 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,73 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,22 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,71 persen; kelompok transportasi sebesar 1,30 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,78 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,98 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,39 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,71 persen. Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 6,65 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen.

Secara month to month (m-to-m) Provinsi Sumatera Barat bulan Januari 2025 mengalami inflasi sebesar 0,03 persen. Hingga Januari 2025, inflasi year to date (y-to-d) Provinsi Sumatera Barat sebesar 0,03 persen.

Pada Februari 2025, Provinsi Sumatera Barat mengalami deflasi 0,16% (m-to-m) dan secara year on year mengalami deflasi sebesar 0,09%. dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,76. Deflasi terdalam terjadi di Kabupaten Dharmasraya sebesar 0,46 persen dengan IHK sebesar 107,35 dan deflasi terendah terjadi di Kota Padang sebesar 0,19 persen dengan IHK sebesar 106,18. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil deflasi year on year terbesar, yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -1,53%.

Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,55 persen dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen. Sementara itu, kelompok yang mengalami inflasi antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,16 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,68 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,28 persen; kelompok transportasi sebesar 1,42 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,71 persen; kelompok pendidikan sebesar 2,98 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,61 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 9,96 persen.

Sumatera Barat mengalami infasi pada Maret 2025 secara *month to month*, *year on year* ataupun *year to date*.

Secara *month to month* tercatat inflasi Sumatera Barat pada Maret 2025 sebesar 1,03 persen dibanding bulan Februari lalu, Sementara, secara year on year tercatat inflasi Sumatra Barat sebesar 0,30 persen dan secara year to date terjadi inflasi sebesar 0,9 persen. Inflasi yang terjadi pada Maret 2025 terjadi karena Tarif Listrik yang kembali normal setelah adanya pemotongan pada Januari dan Februari 2025 lalu.

Tercatat, untuk andil inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga pada Maret 2025 ini sebesar 7,18 persen, inflasi yang terjadi pada kelompok tersebut memberikan andil sebesar 1,18 persen dari total inflasi di Sumatra Barat. Inflasi yang terjadi ini karena tarif listrik yang kembali normal setelah PLN memberikan diskon listrik pada awal tahun lalu. Selain itu, inflasi juga terjadi pada

kelompok pakaian dan alas kaki yang tercatat sebesar 0,19 persen dan memberikan andil sebesar 0,01 persen terhadap inflasi. Untuk kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,97 persen dan memberikan andil sebesar 0,05 persen terhadap inflasi.

Meskipun terjadi inflasi pada kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, kelompok makanan, minuman dan tembakau malah masih mengalami deflasi. Tercatat, untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau terjadi deflasi sebesar 0,57 persen dengan andil terhadap inflasi minus 0,20 persen. Selain itu, kelompok transportasi juga mengalami deflasi sebesar 0,23 persen dan memberikan andil minus 0,02 persen terhadap inflasi.

Inflasi terbesar di Sumatera Barat terjadi di Kota Padang sebesar 1,06 persen secara *month to month*, 0,58 persen secara *year to date* dan 0,4 persen secara *year on year*. Selanjutnya ada Kabupaten Dharmasraya yang mengalami inflasi sebesar 0,99 persen secara *month to month*, 0,84 persen secara *year to date* dan 0,39 persen secara *year on year*.

Selain itu, Kota Bukittinggi juga mengalami inflasi sebesar 0,98 persen secara *month to month*, 0,57 persen secara *year to date* dan 0,50 persen secara *year on year*. Kabupaten Pasaman Barat juga mengalami inflasi sebesar 0,98 persen secara *month to month*, 2,12 persen secara *year to date* dan 0,21 persen secara *year on year*.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah

Laju inflasi Sumatera Barat pada tahun 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan inflasi tahun 2024 namun terjaga pada rentang sasaran inflasi $2.5 \pm 1\%$ (yoy). Peningkatan inflasi diperkirakan berasal dari perbaikan konsumsi masyarakat. Kebijakan penyesuaian beberapa tariff yang diatur pemerintah dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa secara umum.

TPID Sumatera Barat perlu terus berkomitmen melanjutkan berbagai upaya pengendalian inflasi sehingga inflasi terjaga rendah dan stabil pada tahun 2025. Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat tingkat inflasi terendah di Indonesia, dengan angka -2,04% berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada minggu ketiga Maret 2025. Angka ini jauh di bawah rata-rata inflasi nasional yang tercatat sebesar -0,09%. Sebagai langkah konkret dalam mengendalikan inflasi, terutama menjelang perayaan Idul Fitri 1446 H.

Tak hanya di tingkat provinsi, daerah di Sumbar juga unggul dalam kategori kabupaten dan kota. Kota Pariaman mencatat inflasi -3,3%, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat inflasi -6,26%, menjadikannya yang terbaik di kategori masing-masing secara nasional.

Berkat kerja sama pemerintah dan TPID, inflasi di Sumbar berhasil ditekan. Bahkan karena menjadi yang terbaik di seluruh tingkatan nasional, kita mendapat apresiasi berulang dari Pemerintah Pusat.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah

1. Pada tahun 2025 beberapa kegiatan rutin tetap dilakukan diantaranya, Gerakan Pasar Murah, Pemantauan harga ke Pasar-pasar Nagari, Pengecekan stok Beras ke BULOG, Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dan Pelaporan harga bahan pokok.
2. Pemantauan dan Pelaporan harga setiap hari melalui SP2KP dan Web Panel Harga dan pelaporan berkala ke Irjen Mendagri oleh OPD Terkait
3. Lanjutan Bantuan Pangan dari Pemerintah Daerah sumber dana APBD Kab Lima Puluh Kota kepada 54.000 KK Miskin desil 1-4 berdasarkan Data P3KE.
4. Update harga komoditi bahan pokok setiap hari di aplikasi informasi harga barang pokok dengan alamat <https://dev-inflasi.limapuluhkotakab.go.id/>.
5. Rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2025 setiap minggunya bersama Kementrian Dalam Negeri melalui Zoom Meeting.
6. Kunjungan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat ke Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota koordinasi terkait ketahanan pangan
7. Fasilitasi kunjungan penjajakan kerjasama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Solok, pada tanggal 7 Januari 2025
8. Kegiatan pelaksanaan penanaman jagung serentak 1 juta hektar di Nagari Pangkalan oleh Dinas TanHorBun Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa 21 Januari 2025.
9. Rapat Koordinasi teknis persiapan pelaksanaan kegiatan GPM dan Operasi Pasar oleh Dinas Pangan, Rabu 5 Maret 2025.

10. Rapat Koordinasi pembahasan dana ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Dinas PMD/N Kabupaten Lima Puluh Kota, Rabu 19 Maret 2025.
11. Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) HBKN Puasa dan Idul Fitri 2025 oleh Dinas Pangan Lima Puluh Kota, Kamis 20 Maret 2025

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

1. Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lima Puluh Kota mengikuti **High Level Meeting (HLM) Triwulan I** pada Selasa (11/3) di Aula Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumbar. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi, khususnya dalam menghadapi dinamika harga selama bulan Ramadhan hingga Idul Fitri. Pertemuan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah, lembaga, serta instansi di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Sumatera Barat, termasuk Kepala Kanwil DJPb Sumbar,
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) memaparkan sejumlah strategi dalam mengendalikan laju inflasi tetap terjaga pada angka 2,5 plus minus satu persen secara *year on year* (yoy).
3. Berbagai upaya pengendalian inflasi daerah yang dilakukan yakni menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten/kota menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
4. TPID juga berupaya menjaga kelancaran distribusi barang maupun jasa pascabencana hidrometeorologi melalui percepatan perbaikan akses jalan yang terdampak atau putus total.
5. Termasuk memprioritaskan kendaraan logistik pengangkut komoditas pangan di jalur-jalur alternatif yang dibantu pihak kepolisian setempat. Selanjutnya, agar laju inflasi tetap terjaga sesuai target TPID melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi harga serta ketersediaan pasokan di pasar.
6. Mendistribusikan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dan stok pangan komersial oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).
7. TPID juga menguatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait melalui rapat koordinasi teknis mengenai pengendalian inflasi.

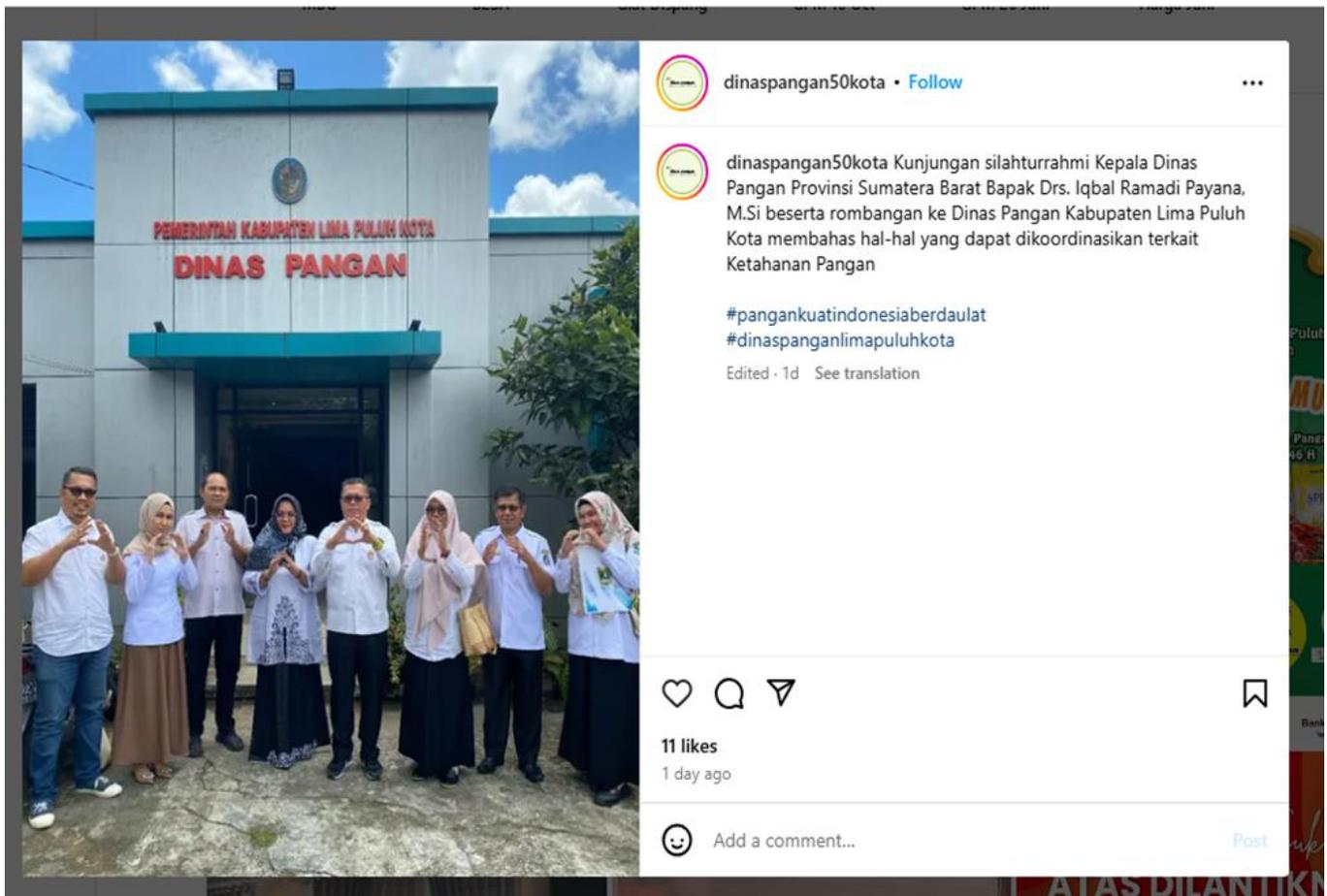
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah

1. Bersama Tim TPID mengidentifikasi alokasi anggaran pada perangkat daerah untuk mendukung program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berkesinambungan dari TW I- TW IV.
3. Kerja sama lintas sektor dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
4. Tujuan utama dari pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga stabilitas harga, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat.
5. Inflasi terjaga, nilai tukar naik, dan kesejahteraan tetap terjamin,
6. Berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang semakin baik serta mendukung kebijakan strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7. Memantau harga bahan pokok dan barang strategis di pasar lokal
8. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk memastikan ketersediaan pasokan dan distribusi barang
9. Menyusun kebijakan yang responsif terhadap fluktuasi harga di masyarakat
10. Menjaga harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tetap stabil
11. Menjaga daya beli masyarakat yang tetap terjaga
12. Untuk mencegah inflasi, dapat dilakukan berbagai antisipasi dan percepatan, seperti: Memantau stok bahan pokok, Melakukan kerjasama dengan satgas pangan, Melakukan operasi pasar, Melakukan sinergi dengan penegak hukum.
13. Penyelenggaraan gerakan pangan murah serentak.
14. Melakukan inspeksi mendadak atau sidak pasar terkait harga dan pasokan barang.
15. Melakukan pasar murah di berbagai kabupaten/kota, intensifikasi distribusi komoditas pangan strategis melalui mobil boks keliling oleh Toko Tani Indonesia Center (TTIC), hingga pendistribusian beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dan stok pangan komersial oleh Bulog.
16. Memperkuat koordinasi dalam mengimplementasikan program pengendalian inflasi pangan secara lebih efektif.

PEMANTAUAN BAPOK



KUNJUNGAN KEPADA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT



PENANAMAN PADI



PANEN RAYA JAGUNG





RAPAT PEMBAHASAN KETAHANAN PANGAN





GERAKAN PANGAN MURAH

BADAN PANGAN NASIONAL **bulog** **POS IND** **Bank Nagari** **BPJS Ketenagakerjaan** **Sinergi Bersama**
Utuh, Sejahtera, Produktif & Berdaya Bangsa

H. SAFNI
BUPATI LIMA PULUH KOTA

AHLUL BADRITO RESHA
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA

Herman Azmar, S.AP, M.Si
SEKRETARIS DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA

Hj. Yunire Yunirman, ST, MSi
KADIS PANGAN LIMA PULUH KOTA

GERAKAN PANGAN MURAH

DALAM RANGKA HBKN RAMADAN DAN IDUL FITRI 2025

Ayo Berbelanja

HARGA DIBAWAH PASAR

KAMIS, 20 MARET 2025
09.00 s.d Selesai

RTH TAMAN MAHKOTA BERLIAN
Komplek Perkantoran Bupati Lima Puluh Kota, Sarilamak

SAFNI
BUPATI LIMA PULUH KOTA

AHLUL BADRITO RESHA
WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA

150

Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota akan Melaksanakan

GERAKAN PANGAN MURAH

Dalam Rangka
Menjaga Kestabilan Harga Bahan Pangan
Menjelang HBKN Idul Fitri 1446 H

AYO BELANJA...

Kamis, 20 Maret 2025
09.00 WIB s/d Selesai
Taman (RTH) Mahkota Berlian Sarilamak

Herman Azmar, AP, M.Si
SEKRETARIS DAERAH KAB. LIMA PULUH KOTA

Hj. Yunire Yunirman, ST, MSI
KADIS PANGAN LIMA PULUH KOTA

Harga Dibawah Pasar

bulog **POS IND** **BPJS Ketenagakerjaan** **Bank Nagari**

Didukung Oleh :



